

BAB II

DINAMIKA KERJASAMA TIONGKOK DAN AFGHANISTAN DALAM PROGRAM *BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI)*

Untuk menganalisis tentang alasan dibalik dilanjutkannya kembali proyek BRI di Afghanistan pasca naiknya kembali Taliban ke kursi pemerintahan, perlu dijabarkan terkait dinamika kerjasama antara Tiongkok dan Afghanistan sejak periode pemerintahan Taliban tahun 1996-2001 sampai ke periode pasca Taliban di tahun 2001-2020. Adapun dalam BAB 2 ini, dijelaskan terkait dua poin terkait dinamika kerja sama antar dua negara tersebut. Bagian pertama berisi tentang dinamika hubungan kerja sama Tiongkok dan Afghanistan yang dimulai dari periode pemerintahan Taliban pada tahun 1996-2001 sampai ke periode 2001-2020. Kemudian, di bagian kedua substansi yang dijabarkan adalah mengenai kerja sama Tiongkok dan Afghanistan di Proyek *Belt and Road Initiative (BRI)* yang baru dimulai tahun 2016 sampai akhirnya dilanjutkan kembali di tahun 2021.

2.1 DINAMIKA PEMERINTAHAN AFGHANISTAN DI BAWAH PEMERINTAHAN TALIBAN

2.1.1 Dinamika Konflik Afghanistan dan Munculnya Kelompok Taliban

A. Afghanistan di Bawah Pendudukan Uni Soviet

Untuk memahami awal mula munculnya Taliban sebagai salah satu kelompok yang cukup dominan di Afghanistan, perlu untuk meninjau rangkaian peristiwa serta konflik yang terjadi di Afghanistan sebelum Taliban resmi terbentuk. Adapun rangkaian

peristiwa tersebut dimulai dengan masa **Pendudukan Uni Soviet di Afghanistan** pada saat Perang Dingin. Peristiwa ini cukup relevan untuk dijelaskan karena merupakan awal dari gagasan terbentuknya pasukan resistensi Afghanistan. Pasukan resistensi tersebut kemudian akan menjadi dasar dari terbentuknya kelompok Taliban.

Sebagai negara di Asia Tengah dengan posisi geopolitik yang cukup krusial, Afghanistan merupakan salah satu negara dunia ketiga yang berada dalam lingkup pengaruh komunisme Uni Soviet. Pasca jatuhnya monarki yang dipimpin oleh Raja Amanullah, Afghanistan memasuki masa pemerintahan republik yang kemudian dikepalai oleh Presiden Mohammad Daud Khan (Kamrany, 1982). Kala itu, Afghanistan di bawah kepemimpinan Presiden Daud merupakan pemerintahan yang progresif dengan ideologi marxisme dan cenderung mendekat ke arah blok Timur. Hal tersebut kemudian menyebabkan hubungan antara Afghanistan dan Uni Soviet semakin erat, yang dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah bantuan luar negeri Uni Soviet untuk Afghanistan sebesar 150 juta dolar Amerika. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pemerintahan Presiden Daud mulai menggeser orientasi pemerintahannya menjadi lebih non-blok dan mulai menjalin hubungan dengan negara-negara Barat. Hal ini dapat dilihat dari tindakannya yang meminta bantuan dari negara-negara

anggota *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC), membersihkan pengaruh Soviet dalam militer Afghanistan, dan menyelesaikan konflik perbatasan dengan Pakistan (Collins, 1980).

Hal tersebut mengakibatkan munculnya gerakan oposisi dari partai-partai yang pro terhadap Uni Soviet. Partai-partai tersebut kemudian membentuk koalisi pro Soviet dengan tujuan untuk menjaga pemerintahan Afghanistan tetap progresif dan terus mengarah ke blok Timur. Pada tahun 1978, koalisi partai tersebut bersama dengan bantuan dari Uni Soviet melakukan pemberontakan dan berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Daud. Latar belakang utama terjadinya revolusi tersebut diakibatkan pergerakan pemerintahan Presiden Daud yang semakin menjauhi lingkup pengaruh Uni Soviet. Pemberontakan ini kemudian dikenal dengan nama Revolusi Saur (Collins, 1980). Pasca peristiwa tersebut, pemerintahan Afghanistan didominasi oleh partai *People's Democratic Party of Afghanistan* (PDPA) dengan faksi dominannya, yaitu faksi Khalq. Pada dasarnya, PDPA merupakan partai yang berisi dua faksi utama, yaitu Khalq dan Parcham. Kedua faksi tersebut sama-sama menganut ideologi marxisme dan condong pro terhadap Uni Soviet. Namun, kala itu PDPA didominasi oleh faksi Khalq yang kemudian juga mendominasi pemerintahan Afghanistan. Ketua PDPA, Nur

Mohammad Taraki kemudian resmi diangkat menjadi presiden baru Afghanistan bersama dengan wakilnya Hafizullah Amin sebagai perdana menteri. Kedua figur tersebut merupakan aktor politik yang berasal dari faksi Khalq di PDPA.

Pemerintahan Afghanistan yang dipimpin oleh Presiden Taraki pada masa itu berada di bawah pengaruh Uni Soviet yang cukup kuat. Banyak kebijakan dalam negeri yang diambil oleh Presiden Taraki berasal dari tekanan dan permintaan Uni Soviet. Rezim Presiden Taraki kemudian dianggap lemah karena hanya mengikuti perintah Uni Soviet. Akibatnya, muncul resistensi dari masyarakat Afghanistan, terutama yang berada di daerah pedesaan. Kebijakan-kebijakan Presiden Taraki pada masa itu dianggap tidak ramah untuk masyarakat pedesaan, ditambah dengan sikap pemerintah yang keras dan otoritarian terhadap masyarakat sipil, menyebabkan penolakan terhadap rezim Taraki terus bertambah di seluruh penjuru Afghanistan (Kamrany, 1982). Demi mengatasi gerakan resistensi dari masyarakat, Uni Soviet kemudian menyarankan untuk membuat kebijakan yang lebih represif dengan tujuan untuk mempertahankan posisi pemerintahan. Namun, usulan itu selalu ditolak oleh Perdana Menterinya, Hafizullah Amin. Karena sifat Perdana Menteri Amin yang tidak kooperatif, Uni Soviet juga menekan Presiden Taraki untuk mencabut jabatan Perdana Menteri tersebut. Akan tetapi, sebelum Amin

diberhentikan dari posisi Perdana Menteri, beliau berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Taraki dan menjadi Presiden Afghanistan selanjutnya (Collins, 1980).

Berbeda dengan rezim Presiden Taraki, pemerintahan Amin lebih cenderung menerapkan kebijakan yang bersifat moderat. Hubungan antara Afghanistan dan Uni Soviet kala itu juga semakin merenggang karena tindakan Presiden Amin yang berusaha untuk mengurangi intervensi Uni Soviet terhadap urusan dalam negeri Afghanistan. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakannya yang menolak bantuan pasukan militer dari Uni Soviet dan meminta pemerintah Uni Soviet untuk memanggil kembali Duta Besarnya di Afghanistan (Collins, 1980). Akibat merenggangnya hubungan kedua negara tersebut, pengaruh Uni Soviet terhadap Afghanistan juga semakin berkurang. Untuk mempertahankan pengaruhnya di Afghanistan, Uni Soviet kemudian meluncurkan invansi militer untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Amin pada tahun 1979. Dalam peristiwa ini, Presiden Amin terbunuh dan digantikan oleh Babrak Karmal sebagai Presiden Afghanistan yang baru. Babrak Karmal merupakan ketua dari faksi Parcham milik PDPA yang akan memimpin pemerintahan Afghanistan yang dibentuk oleh Uni Soviet.

Invansi militer tersebut kemudian menandakan pendudukan Uni Soviet secara resmi di Afghanistan. Adapun alasan yang

melatarbelakangi invansi juga berhubungan dengan kondisi perang dingin kala itu. Uni Soviet ingin menyaingi pengaruh geopolitik Amerika Serikat di Samudera Hindia dengan mempertahankan lingkup pengaruhnya di Afghanistan. Selain itu, lokasi geografis Afghanistan juga dianggap sangat kritis bagi keamanan nasional Uni Soviet. Dengan mempertahankan wilayah Afghanistan Uni Soviet dapat menahan potensi ancaman yang muncul dari Pakistan dan Tiongkok (Kamrany, 1982).

Pendudukan Uni Soviet di Afghanistan kemudian tidak berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh Pemerintahannya. Akibat reputasi pemerintahan Presiden Taraki yang tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat akar rumput, pemerintahan boneka bentukan Uni Soviet juga tidak dapat menghindari dari penolakan yang muncul. Pasca invansi militer Uni Soviet, gerakan resistensi dari masyarakat juga semakin masif. Hal ini dikarenakan sikap pemerintahan Presiden Karmal yang cenderung agresif dan terlalu otoritarian, terutama terhadap masyarakat pedesaan yang menjadi asal muasal munculnya gerakan resistensi. Dalam usaha menahan oposisi, Rezim Presiden Karmal melakukan serangkaian tindakan tidak manusiawi seperti penangkapan paksa, penyiksaan, eksekusi, serta pengeboman daerah pedesaan dan tepi kota. Akibatnya, gerakan pasukan resistensi tersebut juga semakin aktif untuk melawan pemerintahan boneka bentukan Uni Soviet (*Human Right*

Watch, 2001). Pasukan resistensi tersebut kemudian dikenal sebagai pasukan **Mujahidin**.

Pasukan Mujahidin merupakan sekelompok pejuang perang yang terdiri dari gabungan etnis serta suku yang ada di Afghanistan. Masyarakat Afghanistan sendiri memang terbagi menjadi beberapa jenis suku sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. Terdapat suku Pashun—suku mayoritas Afghanistan—yang tersebar di daerah Timur dan Selatan. Kemudian juga terdapat suku Tajik dan Uzbek yang mendiami wilayah utara, serta suku Hazaras yang tersebar di daerah tengah Afghanistan (*European Union Agency for Asylum*, 2021). Selain terdiri dari etnis lokal Afghanistan, pasukan Mujahidin juga menerima relawan dari negara-negara muslim lainnya yang memiliki visi serupa untuk membebaskan Afghanistan dari pendudukan Uni Soviet. Dalam usahanya melawan pasukan militer Soviet, pasukan Mujahidin menerima bantuan dari Arab Saudi, Amerika Serikat, serta lembaga intelijen Pakistan.

Perang antara pasukan resistensi melawan pemerintahan Afghanistan yang dibantu oleh Uni Soviet berlangsung hampir satu dekade. Dengan bantuan senjata militer dan intelejen dari Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Pakistan, pasukan Mujahidin berhasil memberikan tekanan ke pemerintahan boneka bentukan Uni Soviet. Peperangan antar kedua pihak tersebut kemudian mencapai

akhirnya di tahun 1988 dengan ditandatanganinya perjanjian *Geneva Accord*. Dalam perjanjian tersebut, Uni Soviet harus menarik semua pasukan militernya dari Afghanistan paling lambat di bulan Februari tahun 1989 (*Human Right Watch*, 2001). Pada masa ini, pemerintahan Afghanistan dipegang oleh Dr. Najibullah, ketua dari Agensi Keamanan dan Intelejen Afghanistan yang juga menjabat sebagai sekretaris jendral di PDPA. Namun, pemerintahan Presiden Najibullah juga tidak bertahan lama karena aktivitas pasukan mujahidin yang tidak berhenti dan menyebabkan rezimnya runtuh di tahun 1992 (*European Union Agency for Asylum*, 2021). Pasca kekosongan kekuasaan tersebut, Afghanistan memasuki periode Perang Sipil antar faksi pasukan Mujahidin yang memperebutkan tahta kekuasaan Afghanistan. Pada masa ini, benih munculnya kelompok Taliban mulai terlihat sebagai salah satu pihak yang ikut berperang mengambil alih pemerintahan Afghanistan melawan faksi Mujahidin lainnya. Penjelasan terkait perang sipil tersebut akan dijelaskan di bagian selanjutnya.

B. Pembentukan Taliban dan Perang Sipil di Afghanistan

Terkait dengan latar belakang terbentuknya Taliban, rangkaian peristiwa kedua yang akan penulis jelaskan adalah periode **Perang Sipil di Afghanistan** yang terjadi antara faksi pasukan Mujahidin pasca pendudukan Uni Soviet. Rangkaian peristiwa ini sangat relevan dengan pembentukan kelompok Taliban karena menjadi

awal dari munculnya kelompok pelajar yang kemudian menyebut dirinya sebagai “Taliban” ikut serta dalam peperangan.

Pasca penarikan pasukan militer Soviet, Alih-alih menghentikan konflik bersenjata, berakhirnya pendudukan Uni Soviet malah memicu konflik baru antar pemimpin pasukan Mujahidin. Akibat latar belakang etnis yang berbeda, beberapa faksi kelompok Mujahidin kemudian saling berperang untuk berebut kekuasaan. Adapun faksi-faksi tersebut terdiri dari *Northern Alliance* yang dipimpin oleh Ahmad Shah Massoud, Hezbi Islami yang diketuai oleh Gulbuddin Hekmatya, serta Jamiati Islami yang berada dibawah kepemimpinan Burhanuddin Rabbani (*Middle East Eye*, 2021).

Perang sipil tersebut diawali dengan terbentuknya koalisi yang bernama *Northern Alliance* dengan pimpinan Ahmad Shah Massoud. Koalisi ini terdiri dari beberapa faksi Mujahidin, seperti pasukan Tajik milik Ahmad Shah Massoud, Kelompok Militan Uzbek yang diketuai oleh Najibullah, dan Faksi Hazara yang bernama Hizbi Wahdat. Kemudian, hasil dari pembentukan koalisi ini, muncul sebuah kesepakatan yang berisi tujuan umum koalisi untuk mengambil alih pemerintahan Afghanistan dari rezim Komunis peninggalan Uni Soviet. Di sisi lain, Faksi Mujahidin lainnya, yaitu Hizbi Islami yang diketuai Gulbuddin Hikmatyar kemudian mengekspresikan rasa tidak setuju atas keputusan yang

diambil oleh koalisi *Northern Alliance*. Hal ini diakibatkan karena Hikmatyar menganggap keputusan sepihak dari *Northern Alliance* tidak mengikutsertakan semua faksi Mujahidin. Hizbi Islami merupakan salah satu faksi Mujahidin yang tidak diikutsertakan dalam proses negosiasi kesepakatan tersebut. Adapun penolakan terhadap kesepakatan itu dapat dilihat dari reaksi Hikmatyar yang meluncurkan serangan roket secara masif ke Kota Kabul (*Human Right Watch*, 2001).

Pasca pecahnya hubungan antar faksi Mujahidin tersebut, Perang Sipil di Afghanistan kemudian dimulai di tahun yang sama. Pada tahun 1992, pemimpin Tajik dari kelompok Jamiati Islami, Burhanuddin Rabbani naik menjadi Presiden Afghanistan. Pada masa ini, Afghanistan berada di bawah kekuasaan militan Mujahidin. Walaupun sudah ada presiden yang memimpin, perang sipil masih terus terjadi di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan. Rezim Rabbani juga terbilang cukup rapuh akibat serangan-serangan dari faksi Mujahidin lainnya yang berusaha untuk mengambil alih pemerintahan (*Human Right Watch*, 2001). Selama perang sipil berlangsung, masyarakat sipil di Afghanistan harus menjalani kehidupan yang cukup memprihatinkan. Dalam usaha merebut kekuasaan di berbagai wilayah di Afghanistan, tidak sedikit pasukan Mujahidin yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Adapun kekerasan tersebut banyak dialami oleh

wanita yang mengalami tindakan intimidasi serta pemerkosaan. Selain itu, efek dari peperangan juga banyak mengakibatkan korban jiwa dari sisi masyarakat sipil. Sebanyak lebih dari 25 ribu orang menjadi korban jiwa. Di dalam Kota Kabul sendiri terdapat 2 ribu korban jiwa dan ratusan bangunan hancur (*European Union Agency for Asylum*, 2021).

Pada tahun 1994, di tengah-tengah peperangan antar faksi Mujahidin, muncul faksi baru yang terdiri dari sisa-sisa pasukan Mujahidin dan sekelompok pelajar. Faksi ini dibentuk oleh Mullah Mohammad Omar, salah satu pengajar atau *mullah* dari salah satu Madrasah di Afghanistan. Dikarenakan rasa kecewa akibat tidak maksimalnya implementasi hukum islam di Pemerintahan Afghanistan, Mullah Omar kemudian mengumpulkan sekelompok pelajar yang di kemudian hari dikenal sebagai kelompok Taliban. Kelompok ini disebut sebagai Taliban karena dalam bahasa Pashto, Taliban berarti **Murid** (Vox, 2021). Karena latar belakang pendidikan Mullah Omar yang dahulu juga merupakan siswa dari madrasah islam, Taliban kemudian memiliki tujuan utama untuk mengubah Afghanistan menjadi negara islam dan menerapkan implementasi hukum syariat Islam secara efektif.

Aktivitas kelompok ini kemudian menerima dukungan dari Pakistan dan mendapatkan bantuan finansial serta senjata militer. Dengan dukungan dari finansial dan militer dari Pakistan tersebut,

kelompok Taliban mulai pergerakannya untuk mencaplok daerah-daerah kecil di Afghanistan. Kemudian, tepat pada November tahun 1994, Taliban berhasil memukul mundur pasukan Mujahidin di kota Kandahar dan mengambil alih kekuasaan kota tersebut (*Center for International Security and Cooperation*, 2018). Setelah mengambil alih kontrol atas Kota Kandahar, Taliban menerima persepsi positif dari masyarakat sipil. Adapun hal tersebut disebabkan oleh kesuksesan Taliban dalam mengatasi korupsi, menanggulangi aksi pelanggaran hukum, serta membuat Kota Kandahar menjadi tempat yang aman untuk para pedagang.

Gerakan Taliban untuk mengambil alih Afghanistan kemudian terus berlanjut. Karena mayoritas anggota Taliban merupakan bagian dari etnis Pashun, yaitu etnis mayoritas di Afghanistan, cukup mudah bagi mereka untuk merekrut sesama etnis Pashun. Dalam waktu singkat, Taliban berhasil menguasai daerah Selatan Afghanistan yang menjadi tempat tinggal mayoritas etnis Pashun (Vox, 2021). Gerakan Taliban ini terus berlanjut hingga tahun 1996, Taliban berhasil mengambil alih Kota Kabul dari kekuasaan Mujahidin. Pasca pencaplokan kota Kabul, Taliban kemudian mendirikan pemerintahan dan mengubah nama resmi Afghanistan menjadi *Islamic Emirates of Afghanistan*. Pemimpin Taliban pada masa itu, Mullah Mohammad Omar secara resmi naik menjadi Presiden Afghanistan (*Center for International Security and*

Cooperation, 2018). Di bawah kepemimpinannya, Presiden Mullah Omar memulai pemerintahan Afghanistan dengan menerapkan implementasi hukum syariat Islam yang cukup ketat dan opresif. Dengan naiknya Taliban ke tahta kekuasaan Afghanistan, periode perang sipil pun berakhir.

2.1.2 Pemerintahan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban

Berdasarkan tujuan awal dari dibentuknya kelompok Taliban, yaitu mendirikan negara Islam di Afghanistan dengan mengimplementasikan hukum syariat secara menyeluruh, Taliban kemudian secara resmi mendirikan *Islamic Emirates of Afghanistan*. Bentuk pemerintahan Afghanistan yang didirikan oleh Taliban pada dasarnya serupa dengan pemerintahan komunis Afghanistan sebelumnya, yaitu dengan sistem otoritarian yang menolak nilai-nilai liberal. Akan tetapi, perbedaan antar keduanya terletak di dasar nilai yang digunakan dalam pemilihan sistem otoritarian tersebut. Taliban menekankan bahwa tujuan dari Negara Islam di Afghanistan adalah untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menerapkan sistem masyarakat yang sesuai dengan hukum syariat. Pemilihan terhadap sistem pemerintahan tersebut diambil berdasarkan bentuk pemerintahan ideal menurut Islam yang ditafsir oleh Taliban itu sendiri. Menurut Taliban, sistem demokrasi liberal yang diterapkan oleh negara barat merupakan pengaruh doktrin asing yang tidak boleh masuk ke negara Islam (Mobasher et al., 2022).

Dalam menyusun birokrasi pemerintahan, Taliban menggunakan sistem *shura* yang berasal dari doktrin Islam abad pertengahan. Berdasarkan sistem tersebut, suatu negara dipimpin oleh pemimpin tunggal yang disebut sebagai *Amir al-Mu'minin* atau Amir. Seorang Amir memiliki otoritas di lingkup legislatif dan eksekutif yang absolut. Dalam arti bahwa semua proses kenegaraan dan pemerintahan harus melewati persetujuan dari Amir itu sendiri sebelum diterapkan ke masyarakat (Mobasher et al., 2022). Kala itu, Amir yang ditunjuk sebagai pemimpin Afghanistan dipegang oleh Mullah Mohammad Omar, yang merupakan pemimpin kelompok Taliban.

Selain adanya eksistensi Amir, urusan harian pemerintahan di Afghanistan dijalankan oleh lembaga khusus. Dalam hal ini disebut sebagai *Council of Ministers* yang diketuai oleh Perdana Menteri. Tugas dari *Council of Ministers* terpusat dalam urusan pemerintahan sehari-hari, yaitu menegakkan hukum syariat, menyusun dan mengimplementasi undang-undang dalam serta luar negeri, mengawasi militer, serta menyusun atau mendesain rekomendasi undang-undang kepada Amir. Anggota dari *council of ministers* dilantik oleh *Supreme Council* yang juga memiliki hak veto terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh majelis tersebut. Kemudian, selain *council of ministers*, pemerintahan Taliban juga memiliki lembaga hukum yang disebut sebagai *Supreme Court*. Dalam menjalankan tugasnya, *supreme court* terbagi menjadi dua bagian, yaitu peradilan syariah dan

peradilan militer. Sesuai dengan namanya, peradilan syariah bertugas untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum syariah oleh masyarakat sipil. Di sisi lain, peradilan militer menangani kasus yang berada di dalam lingkup yurisdiksi khususnya di bidang militer (Mobasher et al., 2022). Semua keputusan dari lembaga-lembaga tersebut, dari *council of ministers* hingga *supreme court*, harus melewati proses persetujuan dari Amir.

Selain lembaga-lembaga tersebut, pemerintahan Taliban memiliki satu lembaga khusus yang berjalan secara independen. Lembaga tersebut adalah *Ministry of Vice and Virtue*. Kementerian ini memiliki empat tugas utama, **Pertama** adalah mendorong kebaikan serta mencegah kejahatan yang sesuai dengan hukum syariat islam. **Kedua**, mengambil tindakan dengan cara yang efektif untuk menjaga tatanan masyarakat sesuai dengan hukum syariat islam. **Ketiga**, memastikan setiap individu taat kepada aturan islam dalam melaksanakan urusan pribadi maupun sosialnya. **Keempat**, mencegah adanya gerakan kampanye anti-islam (Mobasher et al., 2022). Pada dasarnya, lembaga kementerian ini merupakan lembaga yang menjalankan serta mengawasi implementasi undang-undang yang berdasar pada hukum syariat islam yang ada di Afghanistan.

Penyusunan aturan serta undang-undang di Afghanistan juga dilakukan berdasarkan hukum syariat Islam yang diinterpretasikan oleh kelompok Taliban itu sendiri. Penerapan aturan Undang-Undang

ini kemudian yang membuat pemerintahan Taliban dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, terutama untuk wanita. Adapun beberapa aturan yang dianggap kontroversial dari Pemerintahan Taliban ka, yaitu **Pertama**, melarang wanita yang berumur di atas 10 tahun untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. **Kedua**, mewajibkan wanita untuk mengenakan burqa. **Ketiga**, mewajibkan pria untuk memiliki janggut. **Keempat**, menerapkan hukuman-hukuman yang berat bagi pelanggar hukum, seperti eksekusi publik serta amputasi (Amini & Arifani, 2021).

Akibat penerapan implementasi hukum syariah yang ketat tersebut, Taliban kemudian kehilangan dukungan dan menerima banyak kecaman dari dunia Internasional. Implementasi hukum syariah yang dilakukan oleh Pemerintahan Taliban dianggap tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, terutama terkait dengan Hak Asasi Wanita. Hal ini dapat dilihat dari jumlah negara yang mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, yaitu hanya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Selain karena implementasi hukum syariah yang ketat, pandangan dunia internasional terhadap Taliban juga semakin memburuk saat Taliban menampung pemimpin Al-Qaeda, salah satu kelompok terorisme ekstrimis islam, Osama Bin Laden di Afghanistan. Taliban dan Osama bin Laden memiliki hubungan yang cukup harmonis, dikarenakan dukungan bantuan finansial dari Osama bin Laden yang dahulu cukup membantu Taliban dalam usahanya

untuk menguasai seluruh daerah di Afghanistan. Pemerintahan Taliban juga menyediakan tempat pelatihan militer bagi Al-Qaeda atas permintaan Osama bin Laden (Thomas, 2021).

Karena kedekatan antara Taliban dan Al-Qaeda tersebut, beberapa aktivitas Al-Qaeda kemudian selalu dikaitkan dengan kelompok Taliban. Pada tahun 1998, Al-Qaeda melancarkan serangan ledakan bom di Kedutaan Amerika Serikat untuk Afrika. Merespon peristiwa tersebut, Amerika memberikan serangan misil balasan ke beberapa target Al-Qaeda di Afghanistan. Namun, aksi tersebut masih gagal untuk membunuh pemimpin Al-Qaeda dan meminta Taliban untuk menyerahkannya (Thomas, 2021). Keputusan Taliban untuk tidak menyerahkan Osama bin Laden dianggap sebagai tindakan untuk melindungi kelompok teroris tersebut, sehingga Taliban menerima sanksi embargo ekonomi dari PBB (Amini & Arifani, 2021).

Tidak berhenti di peristiwa tersebut, pasca kejadian penyerangan di Gedung *World Trade Centre* pada 9 September 2001 yang dilakukan oleh Al-Qaeda, Presiden Amerika Serikat—George W. Bush—mengeluarkan pernyataan kepada pemerintahan Taliban. Adapun pernyataan tersebut berisi tiga poin utama. **Pertama**, Pemerintahan Taliban harus menyerahkan Osama bin Laden sebagai pemimpin Al-Qaeda. **Kedua**, Taliban harus menutup pelatihan militer Al-Qaeda yang berlokasi di Afghanistan. **Ketiga**, Pemerintahan Taliban harus memberikan akses kepada Amerika Serikat untuk masuk

ke tempat pelatihan tersebut. Menurut George W. Bush, jika Taliban memutuskan untuk tidak kooperatif, maka mereka juga akan bernasib sama dengan kelompok Al-Qaeda (Thomas, 2021). Namun, permintaan Amerika Serikat tersebut ditolak oleh Taliban dengan alasan bahwa bukti keterlibatan Osama bin Laden dalam peristiwa 9/11 tidak cukup banyak. Akibat penolakan tersebut, Amerika Serikat kemudian melancarkan invasi ke Afghanistan pada Oktober tahun 2001. Dalam periode waktu satu bulan, Amerika Serikat berhasil memukul mundur Taliban dan mengambil alih Kota Kabul (Amini & Arifani, 2021). Pada akhir November 2001, PBB ikut membantu membentuk pemerintahan interim Afghanistan yang kemudian dikepalai oleh Harmid Karzai sebagai Presiden. Pemimpin-pemimpin Taliban yang masih bertahan kemudian melarikan diri ke luar negeri, salah satunya adalah Mullah Mohammad Omar yang pergi ke Pakistan pasca serangan Amerika Serikat. Rangkaian peristiwa tersebut kemudian menandakan berakhirnya rezim Taliban di Afghanistan.

2.2 DINAMIKA HUBUNGAN KERJA SAMA TIONGKOK-AFGHANISTAN

2.2.1 Kerja Sama Tiongkok dan Afghanistan Tahun 1996 – 2001

Pada masa pemerintahan Afghanistan yang berada di bawah pimpinan kelompok Taliban, pemerintahan tersebut hanya mendapatkan pengakuan dari tiga negara, yaitu Pakistan, Uni Emirat

Arab, dan Arab Saudi (Human Right Watch, 2001). Namun, di luar dari negara-negara yang menyatakan pengakuan secara resmi Afghanistan juga menjalani kerja sama dengan beberapa negara. Salah satu negara yang menjalin kerja sama dengan Afghanistan pada saat itu adalah Tiongkok. Tiongkok dan Afghanistan tidak memiliki hubungan diplomatik akibat tidak ada pengakuan secara resmi oleh Tiongkok terhadap kedaulatan Afghanistan. Hal ini membuat hubungan keduanya hanya sebatas kerja sama ekonomi dan keamanan. Walaupun begitu, fokus utama kerja sama tersebut tetap berada di bidang ekonomi. (Zhou et al., 2022).

**Tabel 2.1 Kerja Sama Tiongkok dan Afghanistan Tahun
1996-2001**

No.	Kerja Sama	Tahun	Hasil
1.	Bidang Keamanan	1998	Afghanistan menjamin kelompok ETIM tidak akan menggunakan wilayah Afghanistan untuk menyerang Tiongkok
2.	Bidang Ekonomi	1998	1. Pembukaan jalur transportasi udara dari Kota Kabul ke Kota Urumuqi, Xinjiang; 2. Membuka hubungan kerja sama perdagangan secara formal;

			3. Pemberian bantuan pangan; 4. Pemberian bantuan alat dan senjata militer;
		2000	5. Bantuan pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi di Kota Kabul dan Kota Kandahar;
		2001	6. Penandatanganan perjanjian dagang, yaitu <i>Sino-Taliban Commercial Relation</i> .

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

Kerja Sama antar Tiongkok dan Afghanistan dimulai pada Desember tahun 1998. Pada masa itu, Tiongkok mengirimkan 5 diplomatnya untuk bernegosiasi dengan wakil ketua kelompok Taliban, Mullah Mohammad Hassan. Negosiasi antar kedua pihak melahirkan kesepakatan atas beberapa hal. Dikutip dari tabel 2,1 kesepakatan pertama terkait dengan kerja sama di bidang keamanan. Afghanistan memberikan jaminan untuk memastikan bahwa kelompok *East Turkistan Islamic Movement* (ETIM) tidak menggunakan wilayah Afghanistan untuk menyerang wilayah Tiongkok (Malik, 2002). Kala itu, Tiongkok sedang dihadapkan dengan gerakan separatisme di Provinsi Xinjiang yang didalangi oleh kelompok *East Turkistan Islamic Movement* (ETIM). Gerakan separatisme tersebut bertujuan

untuk mendirikan negara merdeka di Provinsi Xinjiang dan melepaskan diri dari kekuasaan pemerintahan Tiongkok. Kelompok ETIM merupakan salah satu kelompok bersenjata yang berada di bawah naungan Taliban, hal ini dibuktikan dengan bagaimana pemerintahan Taliban pada masa itu memberi izin bagi para anggota kelompok ETIM untuk membangun markas dan menjalani latihan militer di wilayah Afghanistan (Encarnation & Fair, 2023).

Poin kedua, dikutip dari tabel 2.1, kesepakatan antara pemerintahan Tiongkok dan Afghanistan kala itu berkaitan dengan kerja sama ekonomi antar kedua negara. **Pertama**, Tiongkok sepakat untuk membuka jalur transportasi udara secara langsung dari Kota Kabul ke Kota Urumuqi, Ibu Kota Provinsi Xinjiang (Malik, 2002). Hal ini dilakukan agar mobilitas masyarakat serta barang dari Tiongkok ke Afghanistan dan sebaliknya bisa lebih mudah dan lancar. **Kedua**, Tiongkok menyepakati permintaan pemerintah Taliban untuk membuka hubungan kerja sama perdagangan secara formal. **Ketiga**, Tiongkok setuju untuk meningkatkan bantuan pangan ke Afghanistan yang saat itu masih dalam proses transisi pemerintahan. **Keempat**, Tiongkok sepakat untuk memberikan bantuan keamanan berupa senjata dan alat-alat perang (Malik, 2002).

Adapun tindak lanjut lainnya dari kerja sama ekonomi tersebut, sesuai dengan tabel 2.1, merupakan pembangunan jaringan telekomunikasi dan listrik yang mengalami kerusakan pasca perang

sipil. Terkait dengan jaringan telekomunikasi, terdapat beberapa perusahaan Tiongkok yang mengambil proyek pembangunan di Afghanistan. **Pertama**, terdapat Perusahaan Teknologi Huawei yang menandatangani kontrak pembangunan 12 ribu jaringan telekomunikasi di kota Kandahar. Penandatanganan kontrak tersebut terjadi pada tahun 2000. **Kedua**, selain di kota Kandahar, pembangunan jaringan telekomunikasi tersebut juga dilakukan di Ibu Kota Kabul. Pembangunan ini dilakukan oleh Perusahaan ZTE milik Tiongkok yang mengambil proyek pembangunan 5 ribu jaringan telekomunikasi baru (Malik, 2002).

Kemudian, selain jaringan telekomunikasi Tiongkok juga mengambil beberapa proyek pembangunan kembali jaringan listrik. Jaringan listrik di beberapa kota besar seperti Ibu Kota Kabul merupakan salah satu infrastruktur yang terkena dampak cukup signifikan pasca perang sipil. Maka dari itu, pemerintahan Afghanistan ingin melaksanakan kerja sama ekonomi untuk memperbaiki jaringan listrik tersebut. Adapun hasil kerja sama dengan Tiongkok juga mengikutsertakan pembangunan jaringan listrik ini. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh Perusahaan *Donfeng Agricultural Machinery*. Dalam usahanya melakukan pembangunan jaringan listrik, perusahaan tersebut memberikan bantuan dana sebesar 16,5 miliar won (Malik, 2002). Selain jaringan telekomunikasi dan listrik, Tiongkok juga membantu dalam proses pembangunan kembali Perusahaan Semen di

Afghanistan. Seluruh proyek dan investasi yang dilakukan Tiongkok di Afghanistan membuat Tiongkok menjadi salah satu negara investor terbesar di Afghanistan pada saat itu. Menindaklanjuti hal ini, Tiongkok dan Afghanistan menandatangani *Sino-Taliban Commercial Relation* pada 11 September 2001 sebagai peresmian hubungan dagang antar kedua negara (Malik, 2002).

Kerja sama Tiongkok dan Afghanistan terbukti efektif karena tidak adanya serangan-serangan kelompok separatisme ETIM di wilayah Xinjiang pasca kunjungan 5 diplomat Tiongkok pada Desember 1998. Kelompok ETIM yang pada saat itu berada di bawah pengawasan Taliban hanya melakukan aktivitas di dalam wilayah Afghanistan dan tidak melakukan penyerangan ke perbatasan Tiongkok (Encarnation & Fair, 2023). Selain itu, hubungan kerja sama tersebut juga ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional Tiongkok yang ingin melakukan ekspansi pengaruhnya dalam bidang ekonomi, militer dan politik. Strategi utama Tiongkok adalah menjalani kerja sama dengan negara-negara *major powers* dan negara tetangga yang tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional Tiongkok (Encarnation & Fair, 2023).

2.2.2 Kerja Sama Tiongkok dan Afghanistan pada Periode tahun 2001 – 2020

Tabel 2.2 Kerja Sama Tiongkok dan Afghanistan Tahun 2001-2020

No.	Kerja Sama	Tahun	Hasil
1.	Bidang Politik	2001	1. Tiongkok membangun hubungan diplomatik dengan pemerintahan Afghanistan;
		2006	2. Penandatanganan kerja sama politik, yaitu <i>Treaty of Friendship, Cooperation, and Good Neighborhood</i> .
2.	Bidang Ekonomi	2008	1. Kerja sama dalam eksploitasi tambang tembaga Mes Aynak oleh Perusahaan Jiangxi Copper dan China Metallurgical Group Corporation;
		2011	2. Kerja sama <i>joint venture</i> eksploitasi sumber daya minyak bumi di Basin Amu Darya oleh Perusahaan China National

			<i>Petroleum Corporation</i> milik Tiongkok dan <i>Watan Group</i> milik Afghanistan.
--	--	--	---

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

Pasca peristiwa 11 September 2001, kelompok Taliban menghadapi serangan invansi Amerika Serikat yang dilatarbelakangi oleh seruan kampanye *Global War on Terrorism*. Hal tersebut kemudian membuat Taliban harus turun dari tahta kekuasaan pemerintahan Afghanistan setelah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Hamid Karzai terbentuk. Bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Taliban, hubungan kerja sama Tiongkok dan Taliban juga terhenti. Namun, peristiwa tersebut tidak menghentikan Tiongkok untuk membangun hubungan kerja sama dengan pemerintah baru Afghanistan. Dikutip dari tabel 2.2, secara politik Tiongkok segera membangun hubungan diplomatik antar kedua negara dan mengakui kedaulatan Afghanistan sebagai negara merdeka. Kemudian pada tahun 2006, Tiongkok dan Afghanistan menandatangani *Treaty of Friendship, Cooperation, and Good Neighborhood*. Perjanjian ini juga ditandatangani oleh negara-negara Asia Tengah lainnya yang berbatasan dengan Tiongkok sebagai simbol komitmen hubungan bilateral dengan prinsip integritas teritorial, saling menghargai, serta non-intervensi terkait urusan dalam negeri (Zhou et al., 2022).

Pada masa ini, kerja sama Tiongkok dan Afghanistan terfokus pada bidang ekonomi. Dalam hal ini, kerja sama kedua negara fokus dalam ekstraksi sumber daya alam serta investasi pembangunan rekonstruksi Afghanistan (Encarnation & Fair, 2023). Terkait dengan ekstraksi sumber daya alam, Afghanistan merupakan salah satu negara dengan cadangan sumber daya alam yang cukup melimpah. Cadangan tembaga, besi, litium, dan logam tanah jarang di Afghanistan bernilai sebesar 1 triliun dolar Amerika (Zhou et al., 2022). Dikutip dari tabel 2.2, pada tahun 2008, Perusahaan Jiangxi *Copper* dan *China Metallurgical Group Corporation* mendapatkan hak atas tambang tembaga Mes Aynak selama 30 tahun yang terletak di Provinsi Logar, Afghanistan. Kontrak tersebut berhasil dimenangkan oleh Tiongkok setelah menghadapi 4 negara investor lainnya, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Kanada. Tambang tembaga Mes Aynak tersebut memiliki nilai sebesar 40 miliar dolar Amerika dengan jumlah cadangan tembaga sebesar 6 juta ton. Dengan jumlah yang begitu besar, Mes Aynak ditetapkan sebagai tambang dengan cadangan tembaga terbanyak kedua di dunia. Dalam proyek pertambangan ini, kedua Perusahaan Tiongkok tersebut mendapatkan bagian total 50% dari hasil ekstraksi tembaga di tambang Mes Aynak, dengan masing-masing Perusahaan mendapatkan bagian senilai 25%.



Gambar 2.1 Pertambangan Tembaga Mes Aynak di Provinsi Logar, Afghanistan (*Ministry of Mines and Petroleum, n.d.*)

Selain ekstraksi tembaga, Tiongkok juga melakukan eksploitasi terhadap sumber energi yang ada di Afghanistan, seperti minyak bumi dan gas alam. Berdasarkan data dari Jureńczyk (2019), Afghanistan memiliki cadangan minyak mentah dan gas alam yang cukup banyak. Minyak mentah di Afghanistan tersedia sebesar 1.6 miliar barel. Kemudian untuk gas alam tersedia sebesar 16 miliar meter kubik dan 500 juta barel gas alam cair. Berdasarkan tabel 2.2, pada tahun 2011, *China National Petroleum Corporation* milik Tiongkok dan *Watan Group* milik Afghanistan melakukan kerja sama *joint venture* untuk melakukan investasi dalam eksploitasi Basin Minyak Amu Darya (Zhou et al., 2022). Basin Amu Darya terletak di Provinsi Sar-e Pol dan Faryab di daerah utara Afghanistan. Pada tahun 2012, *China National Petroleum Corporation* secara resmi menandatangani kontrak untuk mengeksploitasi sumber energi Afghanistan selama 25 tahun. Kontrak

tersebut diestimasikan bernilai sebesar 700 miliar dolar Amerika (Jureńczyk, 2019).



Gambar 2.2 Basin Amu Darya (Amu Darya Basin Network, n.d.)

Kemudian, terkait dengan usaha pembangunan rekonstruksi Afghanistan pasca perang sipil, Tiongkok juga menjalani beberapa pembangunan infrastruktur bersamaan dengan usaha ekstraksi sumber daya alam. Selain proyek untuk mengeksploitasi cadangan tembaga di Mes Aynak, *China Metallurgical Group Corporation* juga melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar tambang. Infrastruktur tersebut meliputi tambang batu bara, pembangkit listrik tenaga batu bara, jalur rel kereta api, sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah (Jureńczyk, 2019). Pembangunan infrastruktur tersebut merupakan tawaran khusus dari *China Metallurgical Group Corporation* kepada pemerintah Afghanistan yang membuat Tiongkok berhasil memenangkan kontrak proyek eksploitasi tembaga di Mes Aynak.

Namun, pembangunan infrastruktur tersebut tidak dilanjutkan karena ada beberapa kendala dalam proses keberjalanan proyek, salah satu kendala yang berpengaruh besar adalah adanya ancaman keamanan terhadap pekerja yang didatangkan dari Tiongkok.

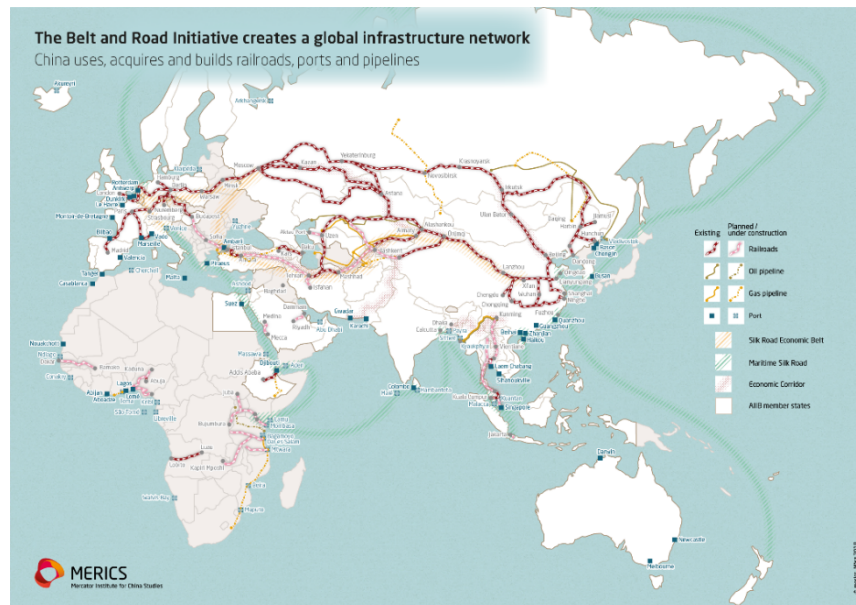
2.3 KERJA SAMA TIONGKOK DAN AFGHANISTAN DALAM PROYEK *BELT AND ROAD INITIATIVE* (BRI)

2.3.1 *Belt and Road Initiative* (BRI)

Pada masa pemerintahan Presiden Xi Jinping, pemerintah Tiongkok sangat gencar dalam menyebarkan narasi terkait keinginan Tiongkok untuk membangun kembali jalur sutera atau *silk road*. Pada dasarnya, jalur sutera sendiri merupakan sebuah rute perjalanan yang digunakan oleh orang Eurasia dua ribu tahun yang lalu untuk berdagangan dan bertukar budaya dari Asia, Eropa dan Afrika. Eksistensi dari jalur sutera pada masa itu menggambarkan semangat dari Tiongkok untuk mendorong perdamaian dan kerja sama, keterbukaan dan inklusitas, serta keuntungan dan manfaat bersama bagi pembangunan negara-negara yang berada di jalur tersebut (*The State Council The People's Republic of China*, 2015). Semangat tersebut lah yang juga menjadi urgensi utama bagi Tiongkok untuk membangun kembali jalur tersebut di abad 21.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, pemerintah Tiongkok melalui Presiden Xi Jinping menginisiasi sebuah proyek pembangunan

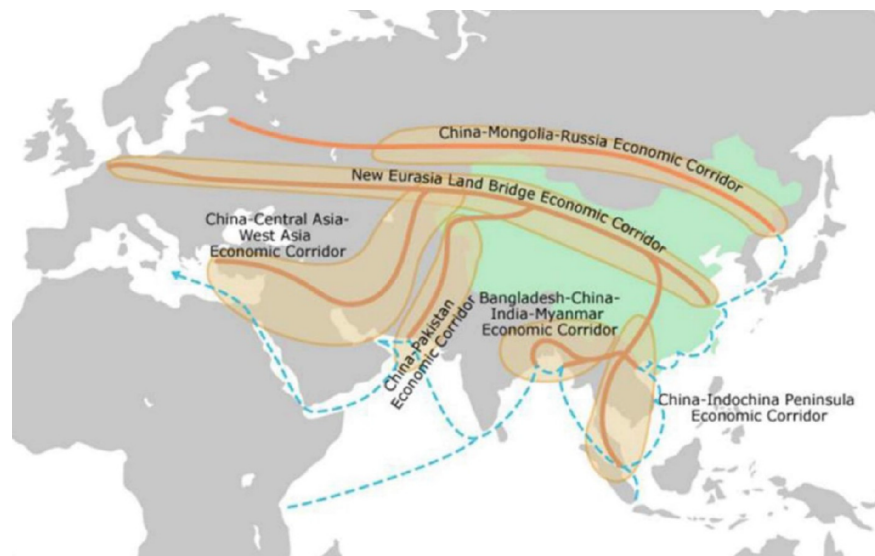
ekonomi berskala besar yang meniru konsep dari Jalur Sutera. Proyek tersebut dikenal sebagai ***Belt and Road Initiative (BRI)***. Proyek ini pertama kali diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 di dua pidatonya. Pertama, adalah pidato Presiden Xi Jinping di Universitas Nazarbayev di Kazakhstan. Kedua, pidatonya di Jakarta pada Oktober 2013. *Belt and Road Initiative (BRI)* merupakan proyek berskala besar yang bertujuan untuk membangun konektivitas serta kerja sama ekonomi dalam hal peningkatan investasi luar negeri dan pembangunan infrastruktur dengan negara-negara yang terkait (Chang, 2019). Proyek BRI ini sendiri terdiri dari dua bagian, **Pertama** adalah proyek *Silk Road Economy Belt* yang menghubungkan Tiongkok ke Eropa melalui jalur Asia Tengah dan Timur Tengah. Pembangunan jalur ini memiliki tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang lebih erat, serta mendorong pembangunan di wilayah Eurasia. **Kedua** adalah proyek *21st Century Maritime Silk Road*, proyek ini menghubungkan Tiongkok ke Eropa dengan jalur laut melalui Asia Tenggara. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama maritim antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara (Rolland, 2019).



Gambar 2.3 Peta Proyek *Belt and Road Initiative* (Merics, 2018).

Dengan dua proyek tersebut, Tiongkok memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, telekomunikasi, pipa energi, serta pelabuhan untuk memfasilitasi pembangunan di tiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Dari dua proyek tersebut, berdasarkan gambar 2.4 BRI memiliki enam koridor utama (*Office of the Leading Group for Promoting the Belt and Road Initiative, 2019*). Pertama adalah *The New Eurasia Land Bridge*. Koridor ini menghubungkan tiga negara sekaligus, yaitu Tiongkok, Mongolia dan Rusia. Kedua adalah koridor *China-Central Asia-West Asia*. Seperti namanya, koridor ini menghubungkan Tiongkok dengan Asia Barat atau Timur Tengah melalui negara-negara di Asia Tengah seperti Pakistan dan Afghanistan. Koridor ketiga adalah *China-Indochina Peninsula*. Koridor ini menghubungkan Tiongkok dengan

negara-negara Indocina di Asia Tenggara. Kemudian koridor keempat adalah *China-Pakistan*, yang dalam hal ini sudah berjalan dalam proyek *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC). Koridor kelima adalah *Bangladesh-China-India-Myanmar* yang menghubungkan keempat negara tersebut. Koridor terakhir adalah *Maritime Road* yang merupakan jalur laut. Jalur ini menghubungkan Asia Tenggara, Oceania, dan Afrika Utara melalui Laut China Selatan, Samudera Pasifik Selatan, dan Samudera Hindia (Chang, 2019).



Gambar 2.4 Enam Koridor *Belt and Road Initiative* (Chang, 2019).

Kerja sama BRI ini dilakukan oleh Tiongkok dengan banyak negara Asia, Afrika, dan Eropa salah satunya adalah Afghanistan. Kerja sama antar Tiongkok dan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban sudah mulai terlihat sejak awal Taliban memerintah pada tahun 2021. Pada tahun tersebut, menteri luar negeri Tiongkok, Wang Yi melakukan pertemuan dengan delegasi Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar.

Dalam pertemuan tersebut, Tiongkok menyatakan berperan aktif dalam proses perdamaian dan rekonstruksi Afghanistan di masa depan (Al Jazeera, 2021b). Kerja sama BRI antara Tiongkok dan Afghanistan merupakan perluasan dari *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) yang juga merupakan bagian dari skema BRI (Ramezani & Devonshire, 2023). Kerja sama antar Tiongkok dan Afghanistan di dalam proyek ini kemudian dijabarkan di bagian selanjutnya.

2.3.2 Kerja Sama Tiongkok dan Afghanistan dalam Proyek *Belt and Road Initiative* (BRI)

Tabel 2.3 Kerja Sama Tiongkok dan Afghanistan dalam Proyek

BRI

No.	Kerja Sama	Tahun	Hasil
1.	<i>Belt and Road Initiative</i> (BRI)	2016	1. Masuknya Afghanistan dalam proyek BRI, di koridor Tiongkok-Pakistan, yaitu <i>China-Pakistan Economic Corridor</i> (CPEC);
		2022	2. Peresmian koridor baru, yaitu koridor <i>China-Uzbekistan-Kyrgystan-Afghanistan</i> ;

		2023	3. Pembentukan koridor baru, yaitu <i>Trans-Afghan Railways</i> .
--	--	------	--

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

Dikutip dari tabel 2.3, Afghanistan pertama kali ikut dalam jejeraan negara yang berpartisipasi dalam proyek BRI pada tahun 2016. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proyek BRI yang mengikutsertakan Afghanistan sebagai salah satu negara yang dilalui adalah koridor Tiongkok-Pakistan, yaitu *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC). CPEC merupakan salah satu proyek unggulan yang berada di bawah skema besar BRI yang terfokus untuk menghubungkan Wilayah Otonomi Uygur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok dengan seluruh wilayah Pakistan (*Government of Pakistan Ministry of Planning Development and Reform*, 2017). Proyek ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dengan total investasi sebesar 62 milyar dolar (Mohammad, 2017). Sama seperti tujuan utama dari proyek BRI, CPEC memiliki tujuan berupa peningkatan konektivitas antar negara di Asia Tengah, terutama Tiongkok dan Pakistan. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok dan juga Pakistan, koridor ini juga direncanakan akan melewati wilayah Afghanistan. Selain koridor CPEC, wilayah Afghanistan juga dianggap penting untuk koridor *China-Central Asia-West Asia*. Namun kala itu, Afghanistan hanya bisa berpartisipasi dalam koridor Tiongkok-Pakistan. Hal ini dikarenakan kondisi dalam negeri

Afghanistan pada masa itu sedang tidak stabil akibat konflik bersenjata dengan gerakan insurgensi dari kelompok Taliban.

Dengan alasan yang sama pula, proyek Tiongkok di Afghanistan terbilang relatif minor dan sedikit. Jika dibandingkan dengan proyek CPEC yang ada di Pakistan, Afghanistan tidak termasuk dalam skala prioritas Tiongkok dalam skema utama BRI. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana personel Tiongkok yang menjalankan proyek di Afghanistan sedikit demi sedikit berkurang dari tahun 2015 sampai 2017 yang hanya terdapat 12 perusahaan aktif yang bergerak di Afghanistan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konflik bersenjata yang terus terjadi di wilayah Afghanistan karena gerakan kelompok insurgensi dapat memberikan resiko bagi proyek yang berskala besar seperti BRI. Terutama terhadap proyek-proyek utama dari koridor Tiongkok-Pakistan yang berada di provinsi Xinjiang dan keseluruhan wilayah Pakistan. Maka dari itu, partisipasi Afghanistan di BRI kala itu dapat dibilang tidak terlalu signifikan (Encarnation & Fair, 2023).

Setelah Taliban mengambil alih kembali pemerintahan Afghanistan di tahun 2021, Tiongkok menjadi salah satu negara yang tidak menunjukkan respon yang negatif terhadap pemerintahan baru Taliban. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok langsung menunjuk duta besarnya untuk Kabul. Pada Oktober 2021, diplomat Tiongkok, Wany Yi dan Mullah Baradar mengadakan pertemuan. Hasil dari pertemuan

ini berupa pernyataan Taliban yang menjamin wilayah Afghanistan tidak akan digunakan oleh kelompok teroris manapun untuk menyerang Tiongkok (Encarnation & Fair, 2023). Hal ini kemudian juga direspon oleh Tiongkok dengan mengirimkan 31 miliar dolar bantuan pangan dan obat-obatan untuk membantu pasca konflik di Kabul. Selain itu, Taliban juga menyatakan keinginannya agar Afghanistan kembali ikut berpartisipasi dalam proyek BRI, terutama di koridor Tiongkok-Pakistan. Merespon hal Tiongkok menyetujui keinginan Taliban dan membuat beberapa perencanaan koridor baru di Asia Tengah.

Dikutip dari tabel 2.3, salah satu perencanaan koridor baru BRI yang mengikutsertakan Afghanistan adalah koridor *China-Uzbekistan-Kyrgystan-Afghanistan*. Eksistensi dari jalur koridor baru ini pertama kali diresmikan pada September 2022, ketika representatif dari otoritas rel kereta api nasional Uzbekistan, Afghanistan, dan Kirgistan mengadakan pertemuan di Tashkent bersama *Zhejiang Union of Railway International Logistic Company*, sebuah perusahaan logistic milik Tiongkok. Berdasarkan pertemuan tersebut, jalur koridor ini bertujuan untuk membuat rute pengiriman barang dari Tiongkok ke Afghanistan dengan melewati Kirgistan dan Uzbekistan. Berdasarkan uji coba yang juga dilaksanakan pada September 2022, jalur koridor baru ini dimulai dari Kota Kashgar di Provinsi Xinjiang dan sampai ke kota Osh di Kirgistan menggunakan

container kargo. Perjalanan dilanjutkan melalui rel kereta api melewati Uzbekistan dan sampai ke kota Hairatan di Provinsi Balkh, Afghanistan.

Kemudian, berdasarkan tabel 2.3, proyek BRI lainnya yang mengikutsertakan Afghanistan adalah proyek *Trans-Afghan Railways*. Proyek ini merupakan salah satu komponen BRI yang cukup penting dan pertama kali diajukan pada tahun 2018. Namun, keberjalanan proyek ini baru dimulai secara resmi pada tahun 2023, terutama setelah penandatanganan perjanjian tripartit antara tiga negara, Pakistan, Afghanistan dan Uzbekistan (Latif, 2023). Pertemuan yang dilaksanakan di Tashkent, Uzbekistan tersebut berisi kesepakatan antara tiga negara untuk meneruskan pembangunan proyek *Trans-Afghan Railways*. Jalur rel kereta ini menghubungkan Uzbekistan, Afghanistan dan Pakistan melalui kota Tashkent, Kabul dan Peshawar. Proyek-proyek yang direncanakan tersebut memiliki tujuan utama untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di Asia Tengah, terutama antara Tiongkok, Afghanistan serta negara-negara disekitarnya. Pemangkasan waktu perjalanan pengiriman barang juga dapat membuat proses perdagangan antar negara menjadi lebih lancar, sehingga aktivitas ekonomi di dalam negeri juga dapat berjalan.